



Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis yang Berbasis Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah

Dewi Fazira¹, Abdul Malik Karim Amrullah², Yogi Pandapotan Siregar³,
Ahmad Wahyudi Zein⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: ddewi3792@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to create an ontological framework of Islamic economics with tawhid and caliphate as its philosophical and theological pillars. Islamic economic ontology integrates moral and spiritual elements into the economic system and describes economic reality according to Islamic teachings. The study, which used the literature research method, found that caliphate leadership emphasizes human responsibility in managing natural resources in a just and sustainable way, while the concept of tawhid serves as a theological foundation that places Allah at the center of all economic activities. When these two ideas are combined, it results in a comprehensive strategy that prioritizes material, social, and spiritual well-being. It is hoped that the ontological framework put forward in this study will serve as a roadmap for creating an economic structure that is not only effective but also socially just and consistent with Islamic principles.*

Keywords: *Economic Theology, Caliphate Leadership, Tawhid, Islamic Economic Ontology*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan kerangka ontologis ekonomi Islam dengan tauhid dan kekhilafahan sebagai pilar filosofis dan teologisnya. Ontologi ekonomi Islam mengintegrasikan elemen moral dan spiritual ke dalam sistem ekonomi dan menggambarkan realitas ekonomi menurut ajaran Islam. Studi yang menggunakan metode penelitian literatur ini menemukan bahwa kepemimpinan kekhilafahan menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang adil dan berkelanjutan, sementara konsep tauhid berfungsi sebagai landasan teologis yang menempatkan Allah sebagai pusat dari semua kegiatan ekonomi. Ketika kedua ide ini digabungkan, maka akan menghasilkan strategi komprehensif yang memprioritaskan kesejahteraan material, sosial, dan spiritual. Diharapkan bahwa kerangka ontologis yang dikemukakan dalam penelitian ini akan berfungsi sebagai peta jalan untuk menciptakan struktur ekonomi yang tidak hanya efektif tetapi juga adil secara sosial dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Teologi Ekonomi, Kepemimpinan Khilafah, Tauhid, Ontologi Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Perspektif yang berbeda dari sistem ekonomi tradisional, yang memberikan penekanan kuat pada materialisme dan individualisme, disediakan oleh ekonomi Islam, sebuah bidang keilmuan yang didasarkan pada ajaran-ajaran hukum Islam. Studi tentang sistem dan struktur realitas dalam arti yang paling luas dikenal sebagai ontologi, dan menggunakan konsep-konsep seperti keberadaan atau menjadi, aktualisasi atau potensi, nyata atau penampilan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan lain sebagainya (Albadri et al., 2023). Ontologi ekonomi Islam, yang melihat sifat realitas ekonomi dari perspektif Islam, adalah salah satu pilar utama ekonomi Islam. Ontologi ini, yang didasarkan pada gagasan Tauhid (kesatuan Tuhan) dan kekhilafahan (tugas manusia sebagai utusan Tuhan di bumi), memandu sistem ekonomi untuk mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan spiritual di samping kesejahteraan material. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan

untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi konvensional, tetapi juga berakar pada ajaran teologis yang mengutamakan tauhid dan kepemimpinan khalifah dalam perspektif Islam. Dalam konteks global yang semakin dipengaruhi oleh sistem ekonomi pasar bebas dan kapitalisme, ekonomi Islam sering dianggap sebagai alternatif yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait ekonomi Islam, sebagian besar dari mereka masih berfokus pada aspek teknis atau hukum fiqh ekonomi tanpa mengintegrasikan dimensi teologis secara mendalam, yang seharusnya menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Seiring dengan perkembangan pemikiran ekonomi, terdapat kecenderungan untuk melihat sistem ekonomi tidak hanya dari sisi instrumen atau kebijakan, tetapi juga dari segi nilai-nilai teologis yang mendasari. Ontologi ekonomi Islam yang memadukan konsep tauhid dan kepemimpinan khalifah menjadi sebuah pendekatan yang lebih holistik untuk memahami bagaimana seharusnya ekonomi Islam beroperasi dalam konteks masyarakat modern. Tauhid, sebagai pilar utama ajaran Islam, memberikan landasan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya dapat dipahami melalui satu kebenaran yang bersumber dari Allah, sementara konsep kepemimpinan khalifah menekankan pada tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan umat manusia dan alam semesta secara adil.

Namun, meskipun terdapat banyak literatur mengenai ekonomi Islam, kebanyakan studi belum menyentuh secara mendalam tentang bagaimana membangun sistem ontologi yang menggabungkan keduanya—tauhid sebagai dasar teologis dan kepemimpinan khalifah sebagai prinsip praktis dalam ekonomi. Hal ini menjadi gap yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun suatu kerangka teologis yang utuh dalam ekonomi Islam, dengan menjadikan tauhid dan konsep khalifah sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu kerangka teologis yang komprehensif dalam ekonomi Islam, yang memadukan prinsip tauhid dan kepemimpinan khalifah guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Ontologi Ekonomi Islam: Kerangka Filosofis

Menurut (Ahmad Afan Zaini, 2021) salah satu bidang studi filosofis tertua adalah ontologi. Perkembangan perenungan di bidang ontologi sudah dapat dilihat pada tahap awal pemikiran Barat. Filsuf Yunani yang bijak, Thales, adalah filsuf Barat tertua yang dikenal. Ekonomi Islam membahas dua bidang sekaligus dari perspektif ontologis. Ilmu fikih mu'amalat dan ilmu ekonomi murni adalah dua bidang tersebut. Oleh karena itu, ekonomi Islam akan selalu mengacu pada kedua bidang tersebut agar dapat berfungsi. Pertanyaan ontologis yang kemudian muncul adalah bagaimana mempertemukan ide-ide sakral yang terdapat dalam fiqh mu'amalat dengan ide-ide sekuler dalam ilmu ekonomi. Masalah ini muncul karena fiqh mu'amalat bersumber dari wahyu yang didasarkan pada ajaran Al Qur'an dan Hadis Nabi, sedangkan ekonomi Islam bersumber dari akal manusia.

Ontologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau eksistensi segala sesuatu. Dalam konteks ekonomi Islam, ontologi berusaha menggali dan memahami dasar-dasar eksistensi dan realitas ekonomi menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam memiliki kerangka filosofis yang berbeda dari ekonomi konvensional, yang didasarkan pada nilai-nilai agama, etika, dan prinsip-prinsip yang berasal dari sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ilmu ekonomi Islam ini adalah bersifat mutlak. Kebenaran dalam Al-Qur'an berbeda dengan hakikat kebenaran dalam sistem ekonomi konvensional. Hakikat ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kekayaan alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Allah bersifat Maha pencipta, Maha Perencana, Maha Mengetahui dan Maha Pemelihara dalam menciptakan alam semesta, yang tentunya sudah memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam alam semesta. Allah akan memelihara alam semesta ini sampai akhir zaman. Kebutuhan bagi makhluk hidup yang ada di bumi telah disediakan dengan cukup. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa alat pemuas kebutuhan manusia terbatas.

- b) Kebutuhan manusia dicukupi dan telah diatur

Menurut ajaran Islam, kebutuhan manusia telah ditentukan sebelumnya. Perspektif Islam tentang kekayaan berbeda dengan persepsi masyarakat pada umumnya. Menurut Islam, kekayaan seseorang bukanlah harta yang dimilikinya, melainkan

kenikmatannya. Manusia biasanya memiliki jumlah kekayaan yang lebih besar daripada yang sebenarnya mereka nikmati. Salah satu konsekuensi dari hukum ekonomi tradisional yang membentuk pemikiran manusia adalah keinginan untuk mendapatkan kekayaan.

c) Pembatasan Konsumsi, Produksi dan Distribusi Kekayaan

Karena kelebihan dilarang dalam Islam, konsumsi haruslah bijaksana dan moderat. Pertanian dan bentuk-bentuk produksi lainnya dianggap mulia karena menghasilkan komoditas yang dibutuhkan. Untuk menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan bersama, kekayaan harus didistribusikan secara adil, tidak hanya di antara orang-orang kaya, dengan menggunakan mekanisme zakat, infak, dan shodaqoh.

d) Islam melarang riba.

Sistem ekonomi yang didasarkan pada wahyu ilahi adalah esensi atau ontologi dari ekonomi Islam; sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana seseorang harus memenuhi kebutuhannya tetapi juga memosisikannya sebagai hamba Allah ta'ala. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam konteks ini adalah bahwa semua usaha harus dikaitkan kembali kepada Allah (Desy Lidya Alsha & Husni Thamrin, 2021).

2. Konsep Pemikiran Teologi Ekonomi Islam

Menurut (Ahyani et al., 2022) bahwa teologi ekonomi Islam adalah sebuah filosofi yang dikembangkan untuk memenuhi keinginan umat Islam dalam hal ekonomi, dan konsep-konsepnya memiliki dampak yang besar bagi kehidupan mereka yang mengikutinya. Misalnya, menjalankan bisnis sesuai dengan politik ekonomi dan politik hukum Islam, mengembangkan strategi untuk wisata halal, kuliner halal, transaksi wakaf uang, dan lain sebagainya. Teologi memberikan landasan moral dan etika bagi ekonomi Islam, yang menentukan bagaimana manusia harus berurusan dengan kekayaan, sumber daya, dan hal-hal lainnya. Teologi ini membahas sejumlah topik yang berkaitan dengan eksistensi manusia, seperti bagaimana mengumpulkan kekayaan dan bagaimana membaginya secara adil ke seluruh masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, teologi mengacu pada ajaran moral dari iman Islam yang berfungsi sebagai dasar untuk tindakan ekonomi. Gagasan teologi ekonomi Islam mengharuskan orang untuk memahami kewajiban moral dan sosial mereka dalam mengelola sumber daya keuangan. Komponen penting dari teologi ekonomi Islam adalah ide zakat, yang merupakan kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan seseorang kepada orang miskin. Selain itu, teologi juga memengaruhi

pengembangan nilai-nilai kebajikan seperti integritas, ketergantungan, dan empati di tempat kerja. kepedulian terhadap orang lain dalam perdagangan dan bisnis (Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat & Ai Reni Ratnasari¹, 2023). Keberadaan ekonomi yang adil, makmur, dan berkelanjutan adalah tujuan dari sistem teologi ekonomi Islam, sebuah kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan keyakinan agama Islam. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip dasar Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah harus diasimilasikan ke dalam semua sistem dan kebijakan ekonomi.

3. Konsep Tauhid dalam Ekonomi

Tauhid adalah komponen utama dari ekonomi Islam dan dianggap sebagai landasan kemanusiaan dan dasar kehidupan yang paling signifikan. Ideologi tauhid mempromosikan kesatuan dan persatuan dalam semua aspek kehidupan. Hanya Allah yang menjadi sumbernya, dan ini merupakan dasar bagi kesatuan semua makhluk-Nya dalam segala bentuk, ukuran, dan rentang hidup mereka (Khairani et al., 2023). Prinsip dasar Islam adalah tauhid, yang menekankan bahwa hanya Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dalam hal ekonomi, tauhid mendorong manusia untuk berpikir bahwa Allah menciptakan dan memiliki semua kekayaan dan sumber daya alam di dunia. Dalam hal ini, manusia hanya ditugaskan untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan hukum-hukum Allah (syariah) sebagai pengelola (khalifah).

Tauhid memiliki konsekuensi terhadap moralitas ekonomi, yang menuntut agar prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keterbukaan tercermin dalam semua keputusan, tindakan, dan transaksi ekonomi. Sebagai contoh, riba dianggap sebagai ketidakadilan dalam sistem ekonomi Islam karena riba merupakan pencurian keuntungan tanpa adanya pertukaran yang adil. Ajaran Tauhid, yang menganjurkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, bertentangan dengan hal ini. Lebih jauh lagi, ide Tauhid dikaitkan dengan pemahaman bahwa kemakmuran dan uang adalah ujian dari Allah yang harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu, keberkahan harus diprioritaskan di atas penghasilan duniawi dalam semua usaha ekonomi.

4. Konsep Kepemimpinan Khalifah

Manusia yang paling ideal-sempurna dalam hal akal, sempurna dalam hal hati nurani, dan sempurna dalam hal fisik-diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Namun, kesempurnaan itu akan menjadi kehinaan yang lebih hina daripada binatang jika manusia yang telah dianugerahi dengan berbagai peralatan yang sangat sempurna tidak dibiasakan untuk beriman dan melakukan hal-hal yang baik. Sebagai hasilnya, manusia diciptakan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah, dan mereka

telah diberi kehormatan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia harus menaati semua ajaran Allah, termasuk larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (QS. Az-Zariyat: 56).

Pengabdian kepada Allah mempunyai pengertian yang luas sekali, yaitu melakukan segala perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada alam semesta. Hal ini ditegaskan Allah ketika dia berfirman kepada Rasul-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya: 107).

Dengan demikian, beribadah kepada Allah juga berarti melakukan yang terbaik untuk mengatur kekhalifahan di bumi. Selain beribadah kepada Allah, manusia diciptakan untuk memenuhi tugas yang telah Allah berikan kepada mereka (QS 33: 72). Manusia diciptakan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepadanya (QS 33: 72). Sebagai pengembalian amanah Allah, manusia diberikan posisi dan potensi untuk memakmurkan bumi karena kemuliaan yang dimilikinya. Salah satu amanah yang dibebankan kepada manusia adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi (QS 11: 61). Khalifah, utusan Allah di muka bumi, memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengatur planet ini (QS 2: 30). Jadi yang dikatakan khalifah adalah orang-orang yang menggantikan selain dirinya, menempati posisinya melaksanakan sesuatu, bertindak dan berbuat atas nama yang digantikan (Rasyad, 2022). Berdasarkan pengertian khalifah, Allah telah menyinggung gagasan tentang manusia, khususnya tentang khalifah Allah di bumi. Manusia menjalankan tugas khalifah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Pada intinya, petunjuk tersebut adalah menggunakan akal yang telah diberikan Allah kepadanya untuk mengatur planet ini dan menjalankan tanggung jawab.

Prinsip- Prinsip Kepemimpinan Khalifah, prinsip khalifah dalam ekonomi Islam, ide kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang adil dan tahan lama. Selain sebagai pemimpin atau penguasa, khalifah juga dipandang sebagai utusan

Tuhan di bumi, dengan peran utama dalam menegakkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan manusia, serta melindungi lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia, baik secara individu maupun kolektif, adalah pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya yang tersedia di lingkungan ekonomi. Salah satu prinsip dasar kepemimpinan khalifah:

- Keadilan dalam menjamin kesetaraan dan hak-hak setiap orang.
- Pertanggungjawaban sosial dan moral dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- Kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, gunakan syura (musyawarah).
- Memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan bagi semua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kerangka ontologis ekonomi Islam yang menggabungkan gagasan tauhid dan kepemimpinan khalifah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Analisis deskriptif dan analitis digunakan untuk memahami dan menghubungkan nilai-nilai filosofis dan teologis Islam dengan ide-ide ekonomi. Dengan memeriksa hubungan antara landasan teologis tauhid dan implementasi aktual kepemimpinan kekhalifahan dalam sistem ekonomi Islam, metode ini berupaya mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif. Temuan-temuan dari penelitian ini disusun secara metodis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam yang didasarkan pada ontologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah dalam Ekonomi Islam

Selain mengatur perilaku ekonomi secara logis, ekonomi Islam melihat semua tindakan ekonomi sebagai tindakan ibadah kepada Tuhan. Tauhid dan kepemimpinan khalifah adalah dua gagasan penting dalam ekonomi Islam yang tidak dapat dipisahkan. Kombinasi keduanya menciptakan landasan filosofis dan teologis yang memandu sistem ekonomi Islam untuk mencapai tujuan moral dan spiritual selain keuntungan moneter. Penting bagi para intelektual Muslim untuk menanggapi kesulitan ekonomi di era modern dengan ekonomi Islam. Dengan

bantuan Al-Qur'an, Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman, respon ini dalam sejarahnya telah berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam diwahyukan oleh Allah SWT kepada semua orang tanpa kecuali; *huda linnaas wa bayyinat in minal huda wal furqon* (Aditya & Utomo, 2024). Penulis esai ini akan membahas bagaimana penggabungan ide tauhid dan kekhalfahan berfungsi sebagai landasan ekonomi Islam dan mempengaruhi sejumlah aspek ekonomi dalam kehidupan Muslim.

1. Tauhid: Dasar Teologis Ekonomi Islam

Dalam teologi Islam, tauhid mengacu pada doktrin keesaan Tuhan. Menurut teori ini, manusia hanyalah pemegang amanah (khalifah) yang ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang telah ada; Tuhan Yang Maha Esa adalah pemilik segala sesuatu di alam semesta. Tauhid merupakan prinsip dasar ekonomi Islam yang mendasari interaksi ekonomi baik secara individu maupun kolektif, selain sebagai dasar spiritual. Gagasan tauhid menyoroti bahwa semua kegiatan ekonomi, termasuk bekerja, berinvestasi, dan berbisnis, harus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah atas dasar individu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim, termasuk dalam dunia bisnis, dapat dilihat sebagai tindakan ibadah dalam Islam selama dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk mematuhi perintah Allah. Hal ini menggeser fokus ekonomi dari mengejar keuntungan moneter menjadi mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu berkah dan keridhaan Allah.

Selain itu, konsep keadilan sosial juga dipengaruhi oleh tauhid. Orang tidak lagi menganggap kekayaan atau sumber daya sebagai milik mutlak karena mereka mengakui bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Kebaikan bersama harus diutamakan, dan segala jenis kekayaan harus ditangani secara bertanggung jawab dan adil, menghindari ketidakadilan atau eksploitasi yang merugikan orang lain.

2. Kepemimpinan Khalifah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, khalifah mengacu pada gagasan bahwa manusia adalah delegasi atau pemimpin Tuhan yang ditugaskan untuk mengawasi planet ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam hal ekonomi, seorang khalifah memiliki kewajiban sosial dan moral untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara berkelanjutan dan adil. Umat Islam secara keseluruhan mendapat manfaat dari kepemimpinan ini, bukan hanya individu atau kelompok. Dalam ekonomi Islam, seorang pemimpin harus menegakkan keadilan sosial dengan mengarahkan ekonomi untuk memberi manfaat bagi seluruh umat, bukan hanya bagi yang kaya dan berkuasa. Selain itu, kepemimpinan ini juga harus menghindari kesenjangan

sosial ekonomi yang parah, memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi, dan mengalokasikan sumber daya secara adil. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah, para pemimpin ekonomi Islam juga diharuskan untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan ekonomi akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan, memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan atau merugikan generasi mendatang.

3. Integrasi Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah dalam Praktik Ekonomi Islam

Sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip moral dan spiritual dihasilkan dari perpaduan antara tauhid dan kekhalfahan. Berikut ini adalah beberapa aplikasi dari integrasi ini dalam ekonomi Islam:

- a. Keadilan Ekonomi: Integrasi tauhid dan kekhalfahan mendorong kebijakan ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh kewajiban zakat, yang berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan untuk membantu orang miskin. Para pemimpin yang mengikuti prinsip khalifah akan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dan bahwa ekonomi berfungsi secara adil.
- b. Etika Bisnis: Dalam ekonomi Islam, bisnis tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial tetapi juga dari sisi moralitas dan etika. Seorang pebisnis yang menggabungkan tauhid dan konsep khalifah akan berusaha untuk melakukan bisnis dengan cara yang tidak merugikan orang lain, menjauhkan diri dari praktik-praktik yang tidak adil, penipuan, dan riba. Nilai-nilai integritas dan keterbukaan menjadi prioritas utama dalam semua transaksi bisnis.
- c. Pembangunan Berkelanjutan: Kepemimpinan khalifah dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya mengontrol bagaimana sumber daya alam saat ini digunakan, tetapi juga melindunginya untuk generasi yang akan datang. Dalam ekonomi Islam, kepemimpinan yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat dinikmati oleh banyak generasi yang akan datang.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Gagasan khalifah juga meminta para pemimpin untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Program-program pendidikan, pengembangan keterampilan, dan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih adil adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan ini.

Penggabungan tauhid dan kekhalfahan dalam ekonomi Islam tidak hanya membentuk landasan filosofis dan teologis sistem, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk

membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral. Sementara gagasan kepemimpinan khalifah menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam mengelola sumber daya ekonomi, konsep tauhid mengingatkan setiap individu dan pemimpin ekonomi bahwa semua tindakan ekonomi harus difokuskan untuk mencapai keridhaan Allah. Dengan bantuan kedua gagasan ini, ekonomi Islam dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dan adil yang difokuskan pada kebaikan semua orang, bukan hanya pada keuntungan materi.

Membangun Kerangka Ontologi Ekonomi Islam yang Mengintegrasikan Konsep Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah sebagai Dasar Filosofis

Upaya untuk mengembangkan pemahaman mendasar tentang keberadaan ekonomi dari perspektif Islam yang mengutamakan nilai-nilai sosial dan spiritual melibatkan pengembangan kerangka kerja ontologi ekonomi Islam yang menggabungkan ide-ide Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah sebagai landasan filosofis. Cara ekonomi dipandang sebagai komponen ibadah dan pengabdian kepada Allah, bukan hanya masalah materi atau tuntutan duniawi, terkait dengan ontologi ekonomi Islam. Landasan ajaran Islam, yaitu Tauhid, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memahami dan menerapkan segala sesuatu di dunia ini adalah dengan mengingat bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Hal ini menyiratkan bahwa setiap kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, harus difokuskan untuk mendapatkan ridha dan manfaat dari Allah. Selain untuk memenuhi kebutuhan material, ekonomi harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mencakup kejujuran dalam bermuamalah, menjauhkan diri dari riba dan perilaku yang bertentangan dengan syariah, serta fokus pada kesejahteraan seluruh umat manusia.

Selain itu, gagasan Islam tentang Kepemimpinan Khalifah menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan kesejahteraan sosial sebagai manajer atau khalifah di bumi sebagai anggota umat manusia. Kewajiban ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan. Prinsip ini, sebagaimana yang berlaku dalam kerangka ekonomi, mengharuskan sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan dan setiap orang dalam masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung, dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Ajaran Islam menyatakan bahwa manajemen ekonomi yang efektif harus mencegah ketidakadilan dan eksploitasi sambil menyeimbangkan kepentingan manusia, masyarakat, dan lingkungan. Dalam hal ini, keadilan sosial dituntut oleh kepemimpinan Khalifah, di mana kemakmuran dan hasil ekonomi tidak

dinikmati oleh segelintir orang, melainkan harus dibagi secara adil dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

Ontologi ekonomi Islam ditransformasikan menjadi sebuah sistem yang memprioritaskan pencapaian nilai-nilai moral dan spiritual di samping keuntungan material dengan menggabungkan ide-ide Tauhid dan Kekhalifahan. Ekonomi Islam memandang etika dan tanggung jawab sosial sebagai komponen penting dari semua usaha ekonomi. Hal ini mendorong pengembangan sistem ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya mempertimbangkan masalah materi tetapi juga merencanakan kehidupan akhirat yang lebih baik. Pembentukan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dimungkinkan oleh kerangka filosofis ekonomi Islam, yang menggabungkan Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah, dengan tujuan akhir untuk mencapai kebaikan bersama, atau masalah, bagi semua orang.

Tantangan dan Peluang dalam Menerapkan Ontologi Ekonomi Islam

Ada beberapa potensi dan hambatan yang terkait dengan penerapan ontologi ekonomi Islam, yang menggabungkan konsep Tauhid dan Kekhalifahan ke dalam sistem ekonomi. Mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam aktivitas bisnis yang mapan dan digerakkan oleh keuntungan adalah hambatan utama. Namun, jika dieksekusi secara efektif, potensi ini dapat menghasilkan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, egaliter, dan berpusat pada masyarakat.

1. Tantangan dalam Menerapkan Ontologi Ekonomi Islam
 - a. Pengetahuan dan Pemahaman yang Terbatas: Sejumlah besar pelaku ekonomi, baik individu, perusahaan, maupun negara, tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Untuk memastikan bahwa ide-ide ini diterima dan digunakan secara luas, diperlukan pengajaran dan sosialisasi yang lebih menyeluruh tentang nilai-nilai ekonomi Tauhid dan Kekhalifahan.
 - b. Transformasi Sistem Ekonomi yang ada: Sistem ekonomi global yang ada saat ini sebagian besar berpusat pada pasar bebas dan prinsip-prinsip kapitalisme yang memaksimalkan keuntungan. Mengatur ulang struktur pasar, hukum, dan kebijakan ekonomi yang ada saat ini merupakan salah satu penyesuaian utama yang diperlukan untuk mengintegrasikan cita-cita Islam, yang menekankan pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kekayaan bersama.
 - c. Penolakan terhadap Perubahan: Beberapa kelompok mungkin menentang peralihan ke ekonomi Islam, terutama mereka yang diuntungkan oleh struktur ekonomi saat ini.

Pemerintah yang lebih terbiasa dengan sistem ekonomi kapitalis, lembaga keuangan multinasional, dan sektor korporasi besar mungkin akan menentang hal ini.

- d. Tantangan Ontologi Geograf ekonomi islam: Dalam ontologi geografi, mendefinisikan ruang dan tempat secara tepat adalah salah satu tugas yang paling sulit. Dalam geografi, tempat dikaitkan dengan pengalaman manusia dan makna yang dibawanya, sedangkan ruang sering dianggap sebagai wilayah yang digambarkan oleh koordinat geografis. Dalam masyarakat yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, ontologi geografi ekonomi Islam bertujuan untuk memahami bagaimana lokasi dan tempat mempengaruhi alokasi sumber daya, kekayaan, dan kesejahteraan. (Sejati et al., 2022).
2. Peluang dalam Menerapkan Ontologi Ekonomi Islam
 - a. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat: Kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok saat ini dapat dikurangi dengan menerapkan filosofi ekonomi Islam yang memprioritaskan keberlanjutan dan keadilan sosial. Pengurangan kemiskinan struktural dan pelebaran kesenjangan kekayaan dapat dicapai dengan penerapan zakat, penghapusan riba, dan distribusi kekayaan yang adil.
 - b. Ekonomi yang Berkelanjutan: Sejalan dengan gagasan Khalifah, filosofi ekonomi Islam memberikan penekanan kuat pada penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan model ekonomi yang lebih ramah lingkungan di mana pembangunan difokuskan pada pelestarian alam dan generasi mendatang di samping keuntungan material.
 - c. Kesejahteraan Spiritual dan Material yang lebih baik: Ekonomi Islam menambahkan dimensi baru pada kesejahteraan dengan menekankan pada tujuan akhir yaitu ridha Allah. Ekonomi Islam membantu manusia mencapai kebahagiaan sejati, bukan kenikmatan sesaat, dengan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.
 - d. Pertumbuhan Keuangan Islam: Ekspansi yang cepat dari industri keuangan Islam adalah salah satu dari banyak potensi dalam penerapan filosofi ekonomi Islam. Di banyak negara, sistem perbankan dan keuangan Islam menjadi lebih dikenal luas sebagai pengganti yang lebih adil dan terbuka untuk sistem keuangan tradisional. Hal ini menciptakan peluang untuk investasi yang lebih bermoral dan teliti.
 - e. Kerjasama Ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara Islam: Dengan menerapkan ontologi ekonomi Islam, negara-negara Islam dapat bekerja sama lebih

erat. Berdasarkan ide-ide keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, sistem ekonomi Islam dapat menjadi fondasi untuk integrasi ekonomi yang lebih kuat.

Implikasi Praktis dalam Pengembangan Kebijakan Ekonomi Islam Berbasis Ontologi, Membangun Sistem Teologis yang Berlandaskan Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah

Menciptakan kebijakan ekonomi Islam berdasarkan ontologi yang menggabungkan ide-ide Tauhid dan Kekhalifahan memiliki konsekuensi praktis yang signifikan, seperti pergeseran yang signifikan dalam cara masyarakat menjalankan ekonominya. Tauhid, yang menyatakan bahwa kehendak Allah harus mengatur semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, menyerukan hukum yang memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi Islam harus berkonsentrasi pada redistribusi kekayaan, penghapusan riba, dan pengembangan sistem keuangan yang terbuka dan adil yang memberikan penekanan yang sama pada keuntungan sosial dan finansial. Sementara itu, kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana didorong oleh prinsip Kepemimpinan Khalifah, yang menyoroti peran manusia sebagai manajer bumi yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan penduduk dan melindungi lingkungan. Sistem pajak yang adil yang mendorong pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur, penciptaan sektor ekonomi yang ramah lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, perumusan kebijakan ekonomi Islam yang didasarkan pada ontologi ini akan mendorong pengembangan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif, yang menekankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian planet ini seperti yang disyaratkan oleh Allah.

Beberapa ayat Al-Qur'an dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam berbasis ontologi yang menggabungkan ide-ide Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah.

1. QS. Al-An'am: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am: 162)

Ayat ini menyoroti bahwa satu-satunya tujuan hidup, termasuk bisnis, haruslah untuk melayani Allah. Menurut prinsip Tauhid, semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang mengagungkan Allah dan menahan diri untuk tidak menyimpang dari perintah-perintah-Nya.

2. QS. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi untuk mengelola kehidupan dan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Gagasan ini memandu kebijakan ekonomi Islam untuk menjamin perawatan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduk serta pengelolaan masyarakat dan sumber daya alam yang adil.

3. QS. Ali Imran: 104

وَأَتَّكِنَنَّ مِنَكُمُ امَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Ayat ini menjunjung tinggi teori ekonomi keadilan sosial, yang menyerukan upaya kelompok untuk membangun masyarakat yang makmur dan adil. Berdasarkan ontologi Tauhid dan Khalifah, kebijakan ekonomi Islam akan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan, sementara juga mempromosikan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menawarkan dasar yang kuat untuk menciptakan kebijakan ekonomi Islam berbasis ontologi yang memprioritaskan faktor sosial dan spiritual serta material, sejalan dengan ajaran Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah dalam melestarikan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ontologi ekonomi Islam, yang didasarkan pada gagasan tauhid dan kepemimpinan khalifah, menawarkan landasan teologis yang menyeluruh untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral. Sementara kepemimpinan khalifah menawarkan arahan yang bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya dan mencapai kesejahteraan sosial secara adil, tauhid berfungsi sebagai fondasi spiritual yang memandu semua kegiatan ekonomi untuk mencari ridha Allah. Ketika kedua gagasan ini digabungkan, maka akan dihasilkan strategi komprehensif yang memberikan bobot yang sama pada keseimbangan sosial dan moral di samping efisiensi ekonomi. Landasan filosofis bagi terciptanya ekonomi Islam kontemporer yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial berhasil dibangun melalui penelitian ini.

Dalam rangka membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, penelitian ini menyarankan agar kebijakan ekonomi menggunakan kerangka ontologis ekonomi Islam, yang menggabungkan tauhid dan kepemimpinan khalifah. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi tentang nilai-nilai ekonomi Islam, diperlukan sosialisasi dan pendidikan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperdalam analisis implementasi konsep ini di berbagai sektor ekonomi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). Ekonomi Islam : Pondasi Kesejahteraan Masyarakat. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Ahmad Afan Zaini. (2021). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.169>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Pemikiran Teologi Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era 4.0. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 24–55. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.874>
- Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, & Ai Reni Ratnasari. (2023). Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 91–101. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.33>
- Albadri, P. B., Ramadani, R., Amanda, R., Nurisa, N., Safika, R., & Harahap, S. S. (2023). Ontologi Filsafat. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 311–317. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i3.148>
- Desy Lidya Alsha, & Husni Thamrin. (2021). Konsep Ontologi dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 33–42.

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8503](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503)

Khairani, D. A., Sari, N., Khoiriyah, S., Ujung, K., Febrianti, Y., Study, P., Syariah, A., Ekonomi, F., & Islam, D. B. (2023). Ontologi Sebagai Landasan Teologi Ekonomi Islam. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(1).

Rasyad, R. (2022). Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 20. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>

Sejati, A. E., Sugiarto, A., Anasi, P. T., Utaya, S., & Bachri, S. (2022). Tantangan filsafat geografi dalam perkembangan geografi terkini: Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 126. <https://doi.org/10.22146/mgi.74942>